



**BPBD
KABUPATEN BEKASI**



RENCANA KERJA PERUBAHAN BPBD KAB. BEKASI TAHUN 2026

**KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA KABUPATEN BEKASI
DESA SUKAMAHI, KECAMATAN CIKARANG PUSAT, KABUPATEN BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2026 .

Renja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026 di BPBD Kabupaten Bekasi. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2026 yang memuat diantaranya yaitu tujuan, sasaran dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2026.

Dengan terbitnya Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN BPBD dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan BPBD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bekasi, Juli 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. MUCHLIS, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750707 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	21
2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.1.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian.....	37
3.1.2 Telaahan rencana Strategis propinsi	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	41
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	54
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....	54
BAB V PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan BPBD Tahun 2025	3
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD dan Pencapaian Renstra BPBD Tahun 2022 Kabupaten Bekasi.....	11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bekasi	17
Tabel 2.3	Identifikasi Masalah	19
Tabel 2.4	Klasterisasi permasalahan dan Isu Strategis.....	21
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD BPBD Kab. Bekasi.....	24
Table 2.6	Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Usulan POKPIR DPRD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Bekasi ..	35
Tabel 3.1	Telaahan Visi, Misi, Strategis BNPB dan BPBD Provinsi.....	38
Tabel 3.2	Keterkaitan Renstra BNPB dengan Renstra BPBD Provinsi dan Renja BPBD Kabupaten Bekasi	39
Tabel 3.3	Keterkaitan Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat dengan Renstra dan Renja BPBD Kabupaten Bekasi.....	41
Tabel 3.4	Tujuan dan sasaran BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025	41
Tabel 3.5	Program, Kegiatan dan Subkegiatan BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025	42
Tabel 3.6	Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 BPBD Kabupaten Bekasi.....	45
Tabel 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan BPBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2025	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	2
------------	---	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa proses penyusunan Renja-PD terdiri dari 3 tahapan utama yaitu :

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, meliputi :

- Pembentukan Tim Penyusun Renja-PD
 - Orientasi mengenai Renja-PD
 - Penyusunan agenda kerja, serta
 - Penyiapan data dan informasi
2. Tahap penyusunan rancangan Renja- PD

3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD..

Bagan Alur penyusunan Renja PD dapat dilihat pada Gambar berikut : **Gambar 1.1**

**Bagan Alur Penyusunan
Rencana Kerja Perangkat Daerah**



Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat berbagai program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2026;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah pada Dokumen RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pemetaan Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi dapat digambarkan pada Tabel berikut :

**Tabel 1.1 Pemetaan Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Daerah dengan BPBD
Tahun 2025-2029**

TUJUAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PERANGKAT DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	4	5	6	7
Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas dan ketahanan daerah dalam bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	BPBD KAB. BEKASI

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12 Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 17 Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
- 18 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh BPBD selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2026;
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur BPBD Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja- PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapaian target Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sub bab ini berisi uraian mengenai:

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra- PD.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.3. Rencana Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, Pengembangan Daerah Terisolir, dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- c. Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD, sebagaimana dapat dilihat dalam Table berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPBD Dan Pencapaian Renstra BPBD S.D Tahun 2025
Kabupaten Bekasi

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2023- 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN N-3 (2023)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN N-2 (2024)			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN N-1 (2025)	PRAKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA PD TAHUN N-2 (2024)	REALISASI RENJA PD N-2 (2024)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHU N BERJALAN TAHUN N-1 (2025)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Reformasi Birokrasi			55 Point	55 Point		55 Point	55 Point	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	14 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100%	13 Dokumen	13 Dokumen	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	N/A	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	11 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	N/A	1 Dokumen	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan selama 12 bulan	N/A	25 orang	30 Orang/Bulan	30 Orang/Bulan	100%	70 Orang/Bulan	70 Orang/Bulan	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersusun	N/A	4 Dokumen	4 Laporan	4 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang terlayani	N/A	70 Orang	-	-	100%	-	-	100%
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	N/A	-	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	N/A	70 stel	80 Paket	80 Paket				
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Perangkat Daerah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	N/A	26 Orang	40 Orang	40 Orang	100%			100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ASN dan Non ASN yang terlayani	N/A	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	14 Jenis	14 Jenis	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	N/A	4 jenis	1 Paket	1 Paket	100%	5 Paket	5 Paket	100%
		N/A	2 Jenis	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	N/A	4 jenis	3 Paket	3 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	N/A	500 Orang	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	N/A	6 Jenis	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	4 Paket	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	N/A	1 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang terfasilitasi	N/A	450 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	N/A	-	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	N/A	80 Orang	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	N/A	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	36 Jenis	36 Jenis	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	N/A	1 Unit	31 Unit	31 Unit	100%	103 Unit	103 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	N/A	6 Jenis	22 Unit	22 Unit	100%	43 Unit	43 Unit	100%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan	N/A	2 Unit			100%	8 jenis	8 jenis	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	N/A	3 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik selama 12 bulan	N/A	3 Jenis	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	N/A	10 Orang	12 Laporan	12 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	N/A	5 jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	175 Jenis	175 Jenis	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	N/A	4 Unit	14 Unit	14 Unit	100%	6 Unit	6 Unit	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang terpelihara	N/A	82 Unit	29 Unit	29 Unit	100%	37 Unit	37 Unit	100%

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	N/A	11 Unit	33 Unit	33 Unit	100%	38 Unit	38 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	N/A	2 Unit	4 Unit	4 Unit	100%	4 Unit	4 Unit	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	N/A	6 Jenis	68 Unit	68 Unit	100%	116 Unit	116 Unit	100%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan sesuai kewenangannya		-	0.93	0.93		0.93	0.93	

	Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sesuai kewenangannya		-	0.70	0.70		0.70	0.70	
	Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sesuai kewenangannya		-	0.55	0.55		0.55	0.55	
	Nilai Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sesuai kewenangannya		-	0.53	0.53		0.53	0.53	
	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sesuai kewenangannya		-	0.40	0.40		0.40	0.40	
	Indeks Ketahanan Daerah		-	0,58	0,58		0,58	0,58	
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang berada di daerah rawan bencana yang mendapatkan pelayanan informasi rawan bencana	N/A	150 Orang	2 Jenis	2 Jenis	100%	3.123 Orang	3.123 Orang	100%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	N/A	200 Orang	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten	N/A	200 Orang	100 Orang	100 Orang	100%	3.123 Orang	3.123 Orang	100%
Kajian Resiko Bencana	Tersusunnya Dokumen Kajian Resiko Bencana	N/A	1 Dokumen	-	-		-	-	
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	N/A	7 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana di Kab. Bekasi	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100 Kawasan	100 Kawasan	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	N/A	200 Orang	25 Kawasan	25 Kawasan	100%			100%
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	N/A	-	30 Keluarga	30 Keluarga	100%			
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jenis Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	N/A	4 Jenis	5 Laporan	5 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jenis Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	N/A	15 Jenis	7 unit	7 unit	100%	241 unit	241 unit	100%
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan/Desa yang ditingkatkan kapasitasnya untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	N/A	33 Desa	20 Kawasan	20 Kawasan	100%	30 Kawasan	30 Kawasan	100%
Penyusunan Rencana Kontigensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontigensi yang dilegalisasi	N/A	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Pasca Bencana yang di tangani	N/A	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%			
--	--	-----	---------	---------	---------	------	--	--	--

Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah peserta Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	N/A	400 Orang	800 Orang	800 Orang	100%	1.150 Orang	1.150 Orang	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	N/A	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	75%
Tim Reaksi Cepat Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kabupaten/Kota	N/A	-	65 Orang	65 Orang	100%	-	-	
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Waktu merespon cepat kurang dari 48 jam untuk setiap Penyakit?wabah Zoonosis Prioritas	N/A	48 Jam	-					100%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Waktu merespon cepat kurang dari 24 jam untuk setiap status bencana	N/A	24 Jam	2 Dokumen	2 Dokumen	100%			100%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana sesuai jenis kejadian bencana	N/A	2 Kejadian	2 Kejadian	2 Kejadian	100%	2.500 Orang	2.500 Orang	100%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Distribusi Logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	N/A	10 Jenis	4.500orang	4.500orang	100%	3 Laporan	3 Laporan	100%
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando sesuai jenis Kejadian Bencana	N/A	4 Kejadian bencana	2 Laporan	2 Laporan	100%			100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana di setiap kejadian bencana	N/A	4 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	6 Jenis	6 Jenis	100%
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Juknis Penanganan Pasca Bencana	N/A	1 Dokumen						100%

Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang dibina / berkontribusi	N/A	26 Lembaga	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	N/A	73 rang	-	-		73 Orang	73 Orang	100%

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jenis Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	N/A	2 Jenis	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	N/A	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana	N/A		1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Pascabencana disemua sektor sesuai berdasarkan Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	N/A		1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta memperhatikan tugas pokok, fungsi, kondisi lingkungan dan isu strategis, maka Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi 2023-2026 adalah “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Dalam mencapai tujuan, BPBD Kabupaten Bekasi melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program Kegiatan.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bekasi

NO	INDIKATOR SASARAN BPBD	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN N-2 (2024)	TAHUN N-1 (2025)	TAHUN N (2026)	TAHUN N+1 (2027)	TAHUN N-2 (2024)	TAHUN N-1 (2025)	TAHUN N (2026)	TAHUN N+1 (2027)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)			125.8	104,39	102,39	100,39	106,39				
2	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			0,45	0,46	0,69	0,71	0,65				
		Pelayanan Informasi rawan bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Layanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		Layanan Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program, dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional BPBD Kabupaten Bekasi.

Perumuskan Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan dengan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten

Bekasi dan Renstra BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun strategi BPBD Kabupaten Bekasi mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Identifikasi Permasalahan

MASALAH POKOK	INDIKATOR	MASALAH	INDIKATOR	AKAR MASALAH
Rendahnya Kapasitas Daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Belum tersedianya kebijakan dan kelembagaan dalam penanganan bencana	Adanya sistem dan perencanaan terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana Adanya kelembagaan untuk penyelenggaraan, pembinaan, dan pengawasan penanggulangan bencana	Belum tersedianya Platform penanggulangan bencana
				Belum tersedianya Dokumen tentang Peta Rawan Bencana
				Belum disusunnya Rencana Penanggulangan Bencana yang terlegalitas
				Rencana Kontigensi untuk seluruh kejadian bencana belum disusun
				Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana belum disusun
				Kelembagaan Bencana belum terorganisir dengan baik
				Regulasi Penanggulangan Bencana belum diperbaharui
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Penanggulangan Bencana belum optimal
				Sistem Informasi Kebencanaan belum terkelola dengan benar
MASALAH POKOK	INDIKATOR	MASALAH	INDIKATOR	AKAR MASALAH

		Belum Efektifnya Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bencana	Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan upaya dalam pengurangan risiko bencana Adanya sarana prasarana dan peralatan untuk kesiapsiagaan bencana daerah	Belum optimalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
				Belum optimalnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
				Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan Bencana belum memadai
				Peralatan dan Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana belum memadai
				Pengelolaan Resiko Bencana belum terlaksana
				Penguatan Kapasitas Kawasan belum optimal
				Kapasitas Tim Reaksi Cepat belum dikembangkan
				Gladi Kesiapsiagaan Bencana belum berkesinambungan
				Kejadian Luar Biasa Penyakit belum di respon dengan baik
				Kejadian Darurat Bencana belum di respon dengana baik
				Logistik Penanggulangan Bencana belum tersedia sesuai kebutuhan
				Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana belum optimal
				Penanganan Bencana Non Alam Epidemi belum optimal

		Belum tersedianya Sistem Pemulihan	Adanya penyelenggaraan pemulihan pasca bencana yang	Penanganan Pasca Bencana belum terorganisir dengan baik
MASALAH POKOK	INDIKATOR	MASALAH	INDIKATOR	AKAR MASALAH
		Pasca-Bencana	terkoordinasi	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana belum berjalan

Analisis dan pengelompokan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana teridentifikasi pada tabel diatas menghasilkan beberapa isu strategis BPBD 2023-2026 sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana;
2. Pembentukan Platform Penanggulangan Bencana;
3. Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Non Alam;
4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kerangka uraian permasalahan tiap-tiap isu strategis adalah sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.4
Klasterisasi Permasalahan dan Isu Strategis

NO	ISU STRATEGIS	KERANGKA URAIAN PERMASALAHAN
1	Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana;	pertambahan penduduk yang tinggi dan pembangunan kawasan industri berpotensi membuat peningkatan kerentanan yang terus menerus sehingga menyulitkan dalam upaya penurunan indeks risiko bencana
		implementasi konsep kesiapsiagaan masih bersifat sektoral dan kondisional, belum adanya sinkronisasi penerapan konsep kesiapsiagaan bencana dengan seluruh masyarakat dan unit perangkat daerah di Kabupaten Bekasi
2	Pembentukan Platform Penanggulangan Bencana;	pertambahan penduduk yang tinggi berpotensi menyulitkan penanganan penanggulangan bencana
		pembangunan perumahan, kawasan industri dan perdagangan yang tidak berdasarkan regulasi tata ruang berbasis kebencanaan berpotensi meningkatkan kerawanan bencana

		implementasi konsep kesiapsiagaan masih bersifat sektoral dan kondisional, belum adanya sinkronisasi penerapan konsep kesiapsiagaan bencana dengan seluruh masyarakat dan unit perangkat daerah di Kabupaten Bekasi
		adanya kesamaan kewenangan dengan instansi lain dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasca bencana
		peningkatan ketahanan daerah membutuhkan kontribusi unit perangkat daerah yang lain, terutama dalam hal Pendidikan, Kesehatan, Penataan ruang, dan Pemberdayaan masyarakat.
3	Penyediaan Sarana	belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi

NO	ISU STRATEGIS	KERANGKA URAIAN PERMASALAHAN
	Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Non Alam;	kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
		pengadministrasian basis data yang belum termutakhirkan secara reguler
4	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	kapasitas SDM aparatur belum memadai
		tata kelola risiko pada pra bencana, penanganan darurat bencana dan pasca bencana membutuhkan sumber daya yang terampil dan profesional

Strategi yang harus dilakukan kedepannya dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah dengan mengarahkan penguatan/ peningkatan kepada 7 (tujuh) Indikator Prioritas yang terdiri dari :

1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan Sistem informasi dan logistic
4. Penanganan Tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Peningkatan kapasitas pemulihan secara terintegrasi, mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi di Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian sasaran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) diantaranya :

- a. Menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB)
- b. Menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- c. Menyusun Dokumen Rencana Kontigensi (Renkon)
- d. Membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana) di daerah-daerah rawan bencana
- e. Membentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana

- f. Membentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan
- g. Memperlengkapi sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana
- h. Membuat aplikasi SITANGGUH

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review terhadap rancangan awal RKPD tahun anggaran 2026, dapat dilihat berdasarkan Tabel 2.3. sebagai berikut :

Tabel 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2026 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

Kode Rekening					Rancangan Awal RKPD tahun 2026					Hasil Penetapan KUA-PPAS 2026				
					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
					Indeks Reformasi Birokrasi			80 Point		Indeks Reformasi Birokrasi			85 Point	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	

1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan	
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket	
1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	72 Orang		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	

1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
---	----	----	------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	

1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
---	----	----	------	----	---------------------------------------	-------------	--	-----------	--	---------------------------------------	-------------	--	-----------	--

1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	

1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
					Nilai Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sesuai kewenangannya				0,93 Poin	Nilai Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan sesuai kewenangannya				0,93 Poin
					Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sesuai kewenangannya				0,70 Poin	Nilai Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik sesuai kewenangannya				0,70 Poin
					Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sesuai kewenangannya				0,55 Poin	Nilai Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana sesuai kewenangannya				0,55 Poin
					Nilai Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sesuai kewenangannya				0,53 Poin	Nilai Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana sesuai kewenangannya				0,53 Poin

					Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sesuai kewenangannya				0,40 Poin	Nilai Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana sesuai kewenangannya				0,40 Poin
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
1	05	03	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	-

1	05	03	2.01	007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bekasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bekasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	05	03	2.02	02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	12 Kawasan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	

1	05	03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	
1	05	03	2.02	015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	
1	05	03	2.02	013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Kegiatan		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	

1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bekasi	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	20 Kawasan		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bekasi	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	66 Orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	66 Orang	

1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Kontinjensi	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen	
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	
1	05	03	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	0		Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahu	1 Dokumen	
1	05	03	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Bekasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Bekasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500 Orang		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3500 Orang	

1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.000 Orang		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5000 Orang	
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan	
1	05	03	2.03	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen rencana oprasi yang sah / legal	1 Dokumen		Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen rencana oprasi yang sah / legal	1 Dokumen	
1	05	03	2.03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas PD yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	70 Orang		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas PD yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	70 Orang	
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	05	03	2.04	02	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	
1	05	03	2.04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen		Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	

1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	
1	05	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	170 Orang		Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	170 orang	
1	05	03	2.04	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	1 Kegiatan		Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	2 Kegiatan	
1	05	03	2.04	11	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Ko	Kab. Bekasi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kab/kota meliputi Lembaga non Pemerintah anatar lain : Lembaga Filantropi, LSM, Ormas, Organisasi Sosial, Organisasi keagamaan, organisaasi relawan, Perguruan Tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	10 Lembaga		Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Ko	Kab. Bekasi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kab/kota meliputi Lembaga non Pemerintah anatar lain : Lembaga Filantropi, LSM, Ormas, Organisasi Sosial, Organisasi keagamaan, organisaasi relawan, Perguruan Tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal		

1	05	03	2.04	15	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	
1	05	03	2.04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota sampai dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	0		Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota sampai dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		

Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2026 sesuai Tabel 2.5. diatas, bahwa rencana kerja hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal semestinya, mengingat adanya kebijakan Bupati Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.7.2.4/SE-14/Bappeda Tanggal 04 Februari 2025 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 yang menyatakan bahwa ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk diadakan pada tahun 2026. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi untuk dialokasikan pada program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mengalami perubahan dengan berkurangnya Pagu yang dikarenakan efisiensi anggaran.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Daftar Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Usulan POKPIR DPRD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 yang harus diverifikasi pada tahap verifikasi TAPD pada tahun anggaran 2026.

Tabel 2.6 Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Usulan POKPIR DPRD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 Kabupaten Bekasi
Perangkat Daerah: **BPBD Kab. Bekasi**

NO	KECAMATAN	DESA / KEL	ALAMAT LOKASI	USULAN	SASARAN
1	BABELAN	BABELAN KOTA	Jl. Gelora Kantor Desa Babelan Kota, Kab. Bekasi, Babelan, Babelankota	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
2	TAMBUN UTARA	SRIMUKTI	Desa Srimukti Kab. Bekasi, Kab. Bekasi, Tambun Utara, Srimukti	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
3	CIKARANG UTARA	KARANG RAHARJA	Kp. Walahir RT 001/004 Kantor Desa Karangraharja Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN

4	CIBITUNG	MUKTIWARI	Perum Permata Nusa Indah Cibitung Blok Diamond RW 016, Kab. Bekasi, Cibitung, Muktiwari	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
5	TAMBUN UTARA	SRIMAH	kantor Desa srimahi Kab. Bekasi , Kab. Bekasi, Tambun Utara	(0) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
6	SERANG BARU	SUKASARI	Jl. Raya Serang Cibarusah, Sukasari, Kec. Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17330,	(0) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
7	PEBAYURAN	SUMBER URIP	Desa Sumberurip - Kab. Bekasi, Pebayuran, Sumberurip	(0) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
8	CIKARANG UTARA	TANJUNG SARI	Kp.Kaliulu 004/002, Kp.Kaliulu RT.005/003 ,Kp.Poncol RT.007/004, Kab. Bekasi, Cikarang Utara, Tanjungsari	(0) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
9	SETU	LUBANG BUAYA	Perum Graha Mustika Media Blok H3 RT 002 RW 010 Desa Lubang buaya, Kec Setu - Kab Bekasi	(0) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN MUSRENBANG DESA/KELURAHAN
10	SETU	LUBANG BUAYA	Perum Graha Mustika Media Blok H RT 002 RW 010, Desa Lubang buaya Kec Setu , Kab. Bekasi,	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD
11	SETU	LUBANG BUAYA	Perum Graha Mustika Media Blok H RT 002 RW 010, Desa Lubang buaya Kec Setu , Kab. Bekasi,	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD
12	SETU	LUBANG BUAYA	Perum Graha Mustika Media Blok H RT 002 RW 010, Desa Lubang buaya Kec Setu , Kab. Bekasi,	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Perahu Karet, Pelampung, Pompa Air, dll)	USULAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD
13	SETU	CIJENGKOL	Perumahan Grand Residence City , Cluster Hang Tuah. RW 013 Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kab. Bekasi	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	USULAN POKOK- POKOK PIKIRAN DPRD

B A B III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian

BPBD Kabupaten Bekasi merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kebencanaan. Secara kelembagaan urusan Kebencanaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengacu kepada Renstra BNPB maupun Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa sasaran penanggulangan bencana difokuskan pada upaya penurunan risiko bencana. Untuk itu, BNPB menyusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024.

- A. Visi BNPB 2020 - 2024
 - “Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana ”
- B. Misi BNPB tahun 2020-2024
 - 1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
 - 2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
 - 3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
 - 4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
 - 5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.
- C. Sasaran Strategis
 - 1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
 - 2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
 - 3. Terpulihkannya Sarana dan prasarana, sosial ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak bencana
 - 4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan

Keterkaitan dalam kerangka logis antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BNPB Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Tabel 3.1
Visi, Misi dan Sasaran Strategis BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Barat

Visi BNPB	Visi BPBD Jawa Barat
Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana	Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat
Misi BNPB	Misi BPBD Jawa Barat

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko 2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana terpadu terkoordinir dan menyeluruh	1. Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana 2. Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
Sasaran Strategis BNPB	Sasaran Strategis BPBD Jabar
1. Terwujudnya kesadaran kesiapan dan kemampuan (pemerintah dan masyarakat dunia usaha) dalam upaya pengurangan resiko (mitigasi) bencana struktural dan non struktural, penanggulangan bencana melalui koordinasi perencanaan program kegiatan peningkatan kapasitas di tingkat pusat dan daerah 2. Terwujudnya penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui 3. peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan sistem logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien. Terwujudnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik dibanding sebelum bencana, melalui peningkatan kapasitas perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dan yang handal, peningkatan koordinasi pelaksanaan serta pengarusutamaan pengurangan resiko bencana dalam setiap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam rangka pembangunan berkelanjutan	1. Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakholder dalam sistem jaringan yang terintegrasi.

D. Telaahan Keterkaitan antara Renstra K/L dan Perangkat Daerah

BNPB dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BNPB Tahun 2020-2024. Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat / Kementerian/ instansi Pembina di tingkat Pusat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Dokumen Perencanaan (Renstra) BNPB Tahun 2020-2024 dengan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Renja Tahun 2026) BPBD Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Keterkaitan Renstra BNPB dengan Renstra & Renja BPBD Kabupaten Bekasi

NO	RENSTRA BNPB TAHUN 2020-2024	RENSTRA BPBD TAHUN 2025-2026/ RENJA BPBD TAHUN 2026
1.	SASARAN : a) Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana b) Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana c) Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak bencana d) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan	SASARAN : Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

BPBD Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2024 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu **“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat”**. Adapun Misi dari BPBD Provinsi Jawa Barat Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana dan Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

A. Tujuan BPBD Provinsi Jawa Barat

Tujuan dibentuknya BPBD Provinsi adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

B. Sasaran BPBD Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2020-2024 Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakholder dalam sistem jaringan yang terintegrasi

C. Telaahan keterkaitan antara Renstra provinsi dan Perangkat Daerah

BPBD Propinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. BPBD Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BPBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Propinsi /instansi Pembina perencanaan di tingkat propinsi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Renja Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3 Keterkaitan Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat dengan Renstra & Renja BPBD Kabupaten Bekasi

NO	RENSTRA BPBD PROPINSI JAWA BARAT TAHUN 2020-2024	RENSTRA BPBD TAHUN 2023-2026 & RENJA BPBD TAHUN 2026
1.	SASARAN : Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakholder dalam sistem jaringan yang terintegerasi	SASARAN : Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran pada Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat dengan Renstra/ Renja BPBD Kabupaten Bekasi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tujuan dan Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026

Tujuan Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Sasaran BPBD	Indikator Sasaran BPBD	Target Tahun 2026
---------------	--------------------------------	--------------	------------------------------	-------------------------

Meningkatnya ketangguhan terhadap penanggulangan bencana dalam rangka mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Risiko Bencana	Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0.69 point
---	-----------------------	--	-------------------------------	------------

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2026 BPBD Kabupaten Bekasi memiliki 2 Program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Tahun 2025-2026, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026

URUSAN/UNSUR	BIDANG URUSAN/ BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR URUSAN
5	01				PERENCANAAN
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1	05	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1	05	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

1	05	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1	05	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	05	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	2.02	009	Penyusunan Rencana Kontijensi
1	05	03	2.02	011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
1	05	03	2.02	013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	2.02	018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1	05	03	2.02	019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
1	05	03	2.02	020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
1	05	03	2.02	021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.02	028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
1	05	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1	05	03	2.04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.04	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
1	05	03	2.04	11	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pasca bencana Kab/Kota
1	05	03	2.04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota
1	05	03	2.04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

1	05	03	2.04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kab/Kota
---	----	----	------	----	--

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bekasi, dapat dilihat tabel berikut ini.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari program Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026. Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari Program Urusan dan Penunjang Urusan Pemerintah yang meliputi:

1. Program Urusan Perencanaan
 - a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan program-program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan Sub kegiatan.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 diuraikan dalam tabel berikut:



**Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi
Tahun Anggaran 2026 PERUBAHAN**

Kode Rekening					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Keluaran	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Catatan
					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					Strategi yang harus dilakukan kedepannya dalam rangka meningkatkan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah dengan mengarahkan penguatan/ peningkatan kepada 7 (tujuh) Indikator Prioritas yang terdiri dari : 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian resiko dan perencanaan terpadu 3. Pengembangan Sistem informasi dan logistic 4. Penanganan Tematik
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		

									kawasan rawan bencana
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	5. Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7. Peningkatan kapasitas pemulihan secara terintegrasi, mulai dari tahap pem

1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bekasi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 Orang/bulan		
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					

1	05	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
1	05	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	72 Paket		
1	05	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Bekasi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		
1	05	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		

1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bekasi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	
1	05	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	
1	05	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1	05	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	23 Unit	
1	05	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	
1	05	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bekasi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	
1	05	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Bekasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	80 Unit	

1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				
	05	03	2,01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi	1 Dokumen	
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Bekasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	150 Orang	
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	05	03	2,02	02	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi		
1	05	03	2,02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	12 Kawasan	

1	05	03	2,02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 Dokumen	
1	05	03	2,02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10 Unit	
1	05	03	2,02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	
1	05	03	2,02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Bekasi	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	20 Kawasan	
1	05	03	2,02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	66 Orang	

1	05	03	2,02	09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		
1	05	03	2,02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	250 Orang	
1	05	03	2,02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahu		
1	05	03	2,02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Bekasi	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	300 Keluarga	
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	3.500 Orang	
1	05	03	2,03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5.000 Orang	

					Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah dokumen rencana oprasi yang sah / legal	1 Dokumen	
1	05	03	2,03	06	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas PD yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	70 Orang	
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
1	05	03	2,04	02	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		
1	05	03	2,04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	1 Dokumen	
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Bekasi	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	
1	05	03	2,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Bekasi	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Laporan	
1	05	03	2,04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	170 orang	

1	05	03	2,04	10	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan
1	05	03	2,04	13	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dab Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Kab. Bekasi	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2026 tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 memuat Kerangka Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan daftar Program, Kegiatan dan Pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaanya dan kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi yaitu :

1. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi tidak hanya memuat program/ kegiatan dan pelayanan public tetapi juga memuat strategi pelaksanaan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Unit kerja dan seluruh pihak terkait pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program renja ini dengan sebaik – baiknya.
3. Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan, Pada Awal RKPD sebesar Rp. 19.014.862.933,-, (Sembilan Belas Milyar Empat Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga puluh Tiga Rupiah).
4. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan.

Cikarang Pusat, Juli 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN BEKASI,

H. MUCHLIS, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19750707 199311 1 001